

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Sistem Pengendalian Internal (X2) juga berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, penguatan pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan keandalan kinerja pemerintah.
3. Kualitas Laporan Keuangan (X3) terbukti berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami laporan keuangan, semakin besar kontribusinya terhadap akuntabilitas.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja yang akuntabel.
5. Keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI agar seluruh instansi mampu memahami dan mengimplementasikannya secara konsisten. Hal ini penting agar kualitas informasi keuangan semakin transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sistem Pengendalian Internal instansi pemerintah perlu memperkuat fungsi pengendalian internal dengan menekankan pada evaluasi risiko, efektivitas pengendalian, serta sistem pemantauan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk unit pengawasan internal yang lebih independen dan meningkatkan peran Inspektorat Daerah.
3. Kualitas Laporan Keuangan penyusunan laporan keuangan harus selalu mengacu pada prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan serta adanya review berkala oleh auditor internal maupun eksternal agar kualitas laporan terus terjaga.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas aparatur melalui pelatihan, pendidikan formal, maupun sertifikasi kompetensi. Selain itu, pemberian penghargaan (*reward*) dan pembinaan berkelanjutan (*coaching*) sangat diperlukan untuk menjaga motivasi dan profesionalisme pegawai.
5. Secara umum diperlukan komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan profesional. Dukungan regulasi, teknologi, serta keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.